

## Nurdin Abdullah Diduga Perintahkan untuk Menangkan Kontraktor Tertentu

JAKARTA (IM) - KPK menduga bahwa Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif, Nurdin Abdullah memberikan perintah khusus untuk memenangkan kontraktor tertentu dalam lelang proyek jalan di Sulsel. Hal tersebut terungkap setelah KPK memeriksa lima Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Sulsel.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pemeriksaan terhadap lima PNS Pemprov Sulsel dilakukan pada Sabtu (13/3), di Polda Sulsel. Adapun lima PNS yang menjadi saksi itu adalah Samsuriadi, Herman Parudani, Andi Salmiati, Munandar Naim, dan Abdul Muin.

"Melalui pengetahuan para saksi tersebut, tim pe-

nyidik KPK terus mendalami antara lain terkait dengan lelang pekerjaan proyek jalan ruas Palampang-Munte-Botolempangan yang diduga ada perintah khusus oleh tersangka NA (Nurdin Abdullah) melalui tersangka ER (Edu Rahmat) agar memenangkan kontraktor tertentu," kata Ali dalam keterangan tertulis, Minggu (14/3).

Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel. Selain Nurdin, ada dua pihak lain yang ditetapkan menjadi tersangka. Nurdin ditetapkan sebagai penerima suap bersama Sekdis PUI'R Sulsel, Eddy Rahmat. Sedangkan Agung Sucipto menjadi tersangka sebagai penyupai. ● mei

## Dipecat Gegara Hadiri KLB, Eks Ketua DPC Demokrat Halmahera Utara Gugat AHY

JAKARTA (IM) - Mantan Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Halmahera Utara, Yulius Dagilaha menggugat Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Yulius tidak terima dengan pemecatan dirinya lantaran menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Gugatan itu tertuang dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus yang dikutip, Minggu (14/3). Gugatan bernomor 167/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst itu didaftarkan pada 12 Maret 2021.

Yulius yang juga Ketua DPRD Halut itu menggugat AHY dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya. Pangkalnya, Yulius dipecat dan digantikan oleh Lazarus Simon. Berikut 3 tuntutan Yulius:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan sebelum Perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 34/ SK/DPP.PD/DPC/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penunjukan Saudara Lazarus Simon Sebagai/Turut Tergugat adalah Pelaksana Tugas

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara menggantikan Penggugat Yulius Dagilaha, S.H sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara Periode 2018-2023 berada dalam status quo dan tidak memiliki kekuatan hukum.

3. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan seluruh perbuatan atau tindakan dan keputusan kepada Penggugat serta seluruh tindakan Keperataan Partai Demokrat di wilayah hukum Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, sampai adanya Putusan pengadilan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Gugatan Yulius menamban daftar gugatan yang dilayangkan anggota PD kubu KLB atas AHY. Sebelumnya Jhonny Allen Marbun juga menggugat AHY karena dipecat sebagai anggota PD. Jhonny yang kini menjadi anggota DPR itu ditunjuk menjadi Sekjen PD kubu KLB Deli Serdang.

Ikut pula menggugat AHY yaitu Marzuki Ali, Tri Yulianto, Damrizal, Achmad Yahya, Yus Sudarso dan Syofwatillah Mohzib. Keempatnya tidak terima dipecat dari PD. Belakangan, Marzuki Ali diadapuk menjadi Ketua Dewan Pembina PD kubu KLB Deli Serdang. ● han

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



## WAKSINASI COVID-19 3-IN-1 DI TANGERANG

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) dan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro (tengah) meninjau pelaksanaan vaksinasi 3-in-1 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (13/3). Kementerian Kesehatan bersama Grab dan Good Doctor meluncurkan Grab Vaccine Center dengan pendekatan 3-in-1 yang mencakup jalur drive thru kendaraan roda empat dan roda dua serta walk in dengan target lima ribu orang penerima vaksin yang dilaksanakan hingga Minggu (14/3).

# Amien Rais Curiga Bakal Ada Pasal Presiden 3 Periode, PKS: Itu Warning

Presiden Jokowi beberapa waktu lalu sudah menegaskan menolak keras jika ada usulan presiden bisa 3 periode.

JAKARTA (IM) - Politik senior Amin Rais melontarkan dugaan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengusulkan pasal presiden 3 periode.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai ucapan Amien Rais itu hanya sebagai bentuk kekhawatiran saja. "Yang saya tangkap dari Pak Amien Rais semacam warning jangan sampai ada kejadian itu. Jadi intinya beliau tidak setuju untuk adanya perpanjangan masa jabatan presiden 3 kali, itu dari yang saya tangkap," kata HNW, ketika dihubungi, Minggu (14/3).

Lagi pula, menurutnya, Jokowi tidak mungkin meminta MPR menggelar sidang istimewa. Sebab, tidak ada kewenangan presiden bisa memerintahkan MPR menggelar sidang istimewa.

"Tidak mungkin Pak Jokowi meminta sidang istimewa. Pertama, beliau tahu tidak ada kewenangan presiden meminta MPR menyelenggarakan sidang istimewa, dalam pasal mana pun tidak ada, sidang istimewa itu ditentukan oleh MPR sendiri, bukan permintaan presiden, tapi kondisi yang diputuskan internal MPR," ujar HNW.

Lebih lanjut, HNW meyakini Jokowi tidak akan men-

gusulkan hal tersebut. HNW menyebut Jokowi sudah pernah menyampaikan secara terbuka bahwa dia tidak akan mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Pak Jokowi itu kan Desember 2019 sudah menyatakan wacana terbuka waktu itu kan wacana ini muncul ada yang mengusulkan masa jabatan Pak Jokowi dibikin 3 periode, beliau sudah menjawab dengan sangat terbuka, beliau menyatakan bahwa yang mengusulkan 3 periode itu adalah orang yang cari muka kepadanya," ujarnya.

"Beliau menolak itu kan menampar wajah saya," maknanya beliau menolak karena beliau terpilih sebagai realisasi daripada UUD yang sudah diamandemen. Ketentuannya di pasal 7 dapat dipilih kembali 1 masa jabatan berikutnya artinya hanya dua kali saja. Jadi saya masih percaya Pak Jokowi tidak

akan berubah seperti apa yang disampaikan pada Desember 2019 itu," lanjut HNW.

Wakil Ketua MPR Fraksi PPP, Arslan Sanjaya, menganggap pernyataan Amien Rais soal perpanjangan Masa jabatan presiden menjadi 3 periode itu hanya candaan.

"Kami yang di MPR tertawa membaca berita yang memuat dugaan atau kecurigaan Pak AR terkait amandemen UUD NKRI Tahun 1945 untuk mengubah pasal masa jabatan presiden sehingga bisa sampai 3 periode. Kenapa tertawa? Kami melihatnya itu political joke atau mob dari Pak AR saja," kata Arslan, kepada wartawan, Minggu (14/3).

Arslan menegaskan belum ada wacana mengubah pasal masa jabatan presiden. MPR, kata Arslan, tengah mengkaji lebih lanjut terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

"Karena di agenda MPR saat ini tidak ada agenda sama sekali untuk merubah pasal masa jabatan Presiden. Jangankan agenda perubahan, bahkan tingkatan pemikiran awal saja tidak ada sampai saat ini," ujarnya.

Amien Rais melontarkan dugaan Presiden Jokowi akan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Amien men-

gatakan dalam sidang istimewa itu diduga akan ada usul pasal mengenai masa jabatan presiden 3 periode.

Pernyataan itu disampaikan Amien Rais melalui YouTube Channel Amien Rais Official yang diunggah pukul 20.00 WIB, Sabtu (13/3). Mula-mula, Amien mengatakan rezim Jokowi ingin menguasai seluruh lembaga tinggi yang ada di Indonesia.

"Kemudian yang lebih penting lagi, yang paling berbahaya adalah ada yang betul-betul luar biasa skenario dan back-up politik serta keuangannya itu supaya nanti presiden kita Pak Jokowi bisa mencengkeram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR, dan DPD. Tapi juga lembaga tinggi negara lain, kemudian juga bisa melibatkan TNI dan Poln untuk diajak main politik sesuai dengan selera rezim," ujar Amien.

Amien kemudian menyebutkan, setelah lembaga negara itu bisa dikuasai, Jokowi akan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Salah satu agenda sidang istimewa itu adalah memasukkan pasal masa jabatan presiden hingga tiga periode.

"Jadi semua sudah ada tahapan, it's now or never tomorrow will be to late," tambah Amien. ● han

## Jokowi Ajak Masyarakat Renungkan Karunia Hidup dari Sang Pencipta

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat media sosial - twitter, facebook dan instagram - menyampaikan ucapan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943 yang jatuh pada Minggu (14/3) kepada seluruh umat Hindu di Tanah Air.

"Dalam hening dan sepi, kita menyelam ke lubuk hati,

merenungkan karunia hidup dari Sang Pencipta," tulis Jokowi mengawali ucapan tersebut.

Jokowi melanjutkan, hal tersebut agar seluruh umat bisa bangkit dan tetap bersemangat serta optimistis. Terlebih dengan menyepi, amarah dan dendam pun disebutkannya bisa hilang.

"Maka meluruhlah amarah, dendam, dan rasa dengki. Dan kita pun bangkit dengan penuh semangat dan optimisme," kata Jokowi.

"Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943," lanjut Jokowi seperti yang ada dalam gambar yang turut diunggahkannya. ● han

## Remisi Khusus Hari Raya Nyepi Hemat Anggaran Lebih Rp500 Juta

JAKARTA (IM) - Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM Reynhard Silitonga mengatakan, pemberian remisi khusus (RK) Hari Raya Nyepi 2021 dapat menghemat anggaran negara hingga Rp 553.605.000.

Remisi khusus diberikan kepada 1.115 narapidana beragama Hindu, Minggu (14/3). "Pemberian RK Hari Raya Nyepi tahun ini berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp 553.605.000 dengan rata-rata biaya makan per hari sebesar Rp 17.000 per orang," ujar Reynhard dikutip dari siaran pers Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjen PAS) Sabtu (13/3).

Dia melanjutkan, penerima RK yang tersebar di seluruh Indonesia ini terdiri dari 1.113 narapidana penerima RK I atau pengurangan sebagian dengan rincian 213 menerima remisi 15 hari, 764 narapidana menerima remisi satu bulan, 116 narapidana menerima remisi 1 bulan 20 narapidana menerima remisi dua bulan.

Sementara itu 2 narapidana menerima RK II atau langsung bebas usai menerima remisi 15 hari. Reynhard menuturkan, usulan pemberian remisi yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia tersebut dilakukan secara online melalui Sistem Database Pemasarakatan (SDP). Dia menyebut, pemberian remisi ini diharapkan dapat

memotivasi narapidana untuk menjadi insan yang lebih baik dan tetap berperilaku sesuai aturan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai informasi, Kantor Wilayah Kemenkumham Bali menyumbang narapidana penerima remisi terbanyak dengan jumlah 768 narapidana. Kemudian, disusul Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah sebanyak 82 narapidana dan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan sebanyak 51 narapidana. Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan mengenai pemberian Remisi terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, Perubahan Pertama: PP RI No. 28 Tahun 2006, Perubahan Kedua: PP RI Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberian Remisi kepada WBP. ● mei

## Setelah Bertemu Surya Paloh, Airlangga Datangi Prabowo di Hambalang, Bahas Apa?

JAKARTA (IM) - Beredar kabar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sabtu (13/3). Pertemuan tersebut digelar di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Adanya pertemuan itu dibenarkan oleh Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini Meutya Hafida. Ia menerangkan, Airlangga bertemu sebagai Ketua Umum PB Wushu Indonesia (PBWI), sedangkan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Pencak Silat (PB IPSI).

"Pertemuannya dalam rangka persiapan Bidding Olimpiade 2023," kata Meutya saat dikonfirmasi Sabtu (13/3). Selain itu, ia mengungkapkan, pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali. Lanjut Meutya, pertemuan ini dalam rangka silaturahmi antar keluarga Partai Golkar dan Gerindra. Pertemuan itu, kata dia, terlaksana dalam suasana santai di akhir pekan. Namun, ia tak memungkirinya apabila pertemuan keduanya juga membahas mengenai dunia partai politik di Indonesia.

"Bicara tentang kerja sama antar partai. Dalam berbagai hal terutama demi mendukung pemerintah mengawal perang terhadap Covid-19, dan lainnya," ujar Meutya. Pada pertemuan tersebut,

ada hal menarik yang diungkapkan Meutya yaitu dibuka dengan drumband bernadakan Mars Partai Golkar dan Mars Gerindra secara bersamaan.

Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut membahas mengenai agenda Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Ketua Komisi I DPR ini menolak membenarkan. Menurutnya, pertemuan antara Airlangga Hartarto dan Prabowo Subianto dirasa masih terlalu dini apabila membahas mengenai Pilpres 2024.

"Masih terlalu dini ya. Yang utama, bersahabat baik dengan seluruh partai. Karena dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) kemarin, Golkar kembali menegaskan, Golkar membuka koalisi dengan semua," jelasnya.

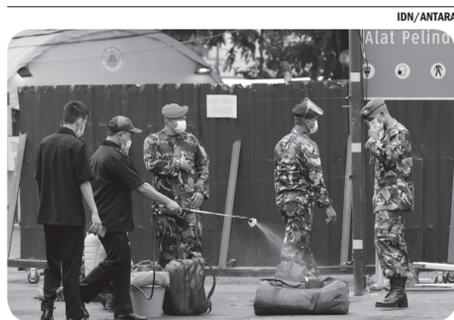
Sebelumnya, Meutya telah mengungkapkan bahwa partainya membuka peluang untuk berkoalisi dengan semua partai politik dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Adapun terkait strategi Partai Golkar dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2024, Golkar terbuka untuk berkoalisi dengan semua partai politik yang mempunyai visi misi yang sama," katanya.

Pernyataan tersebut merupakan respons Meutya terkait beredarnya pemberitaan yang mengaitkan pertemuan antara Ketua Umum (Ketum) Nasdem Surya Paloh dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dengan rencana konvensi. Keduanya bertemu di villa milik Paloh di Pulau Kialiga, Kepulauan Seribu, Jakarta, Minggu (14/2).

Ia mengatakan, hingga kini Partai Golkar memastikan tidak sedang mengagendakan konvensi. Kendati demikian, menurutnya Partai Golkar paham mengenai proses dan mekanisme konvensi. Meutya juga memastikan, partainya memiliki strategi khusus untuk menghadapi Pileg dan Pilpres di 2024.

"Partai Golkar sebagai partai yang mengawali proses konvensi paham betul terkait proses dan mekanisme konvensi, dan saat ini Golkar tidak mengagendakan konvensi," ujarnya. ● han



## KESEMBUHAN PASIEN COVID-19 DI RSL KOGABWILHAN II

Petugas menyemprotkan larutan disinfektan ke barang bawaan pasien COVID-19 yang telah sembuh sebelum meninggalkan Rumah Sakit Lapangan Kogabwilhan II Jalan Indrapura, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (14/3). Rumah sakit yang diresmikan pada Selasa (2/6/2020) tersebut sampai saat ini telah berhasil menyembuhkan sebanyak 6.631 orang pasien COVID-19.

| PT KARYA TEKNIK MULTIFINANCE  |                        |                               |   |                          |
|---|------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|
| Kantor : Jl. Kali Besar Barat No. 37 Jakarta  |                        |                               |   |                          |
| <b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b><br>31 Desember 2020 dan 2019<br>(Dalam Rupiah Penuh)   |                        |                               |   |                          |
| <b>AKTIVA</b>   | <b>2020</b>            | <b>2019</b>                   | <b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>  | <b>2020</b>              |
|   |                        |                               |   | <b>2019</b>              |
|   |                        |                               |   | <b>Disajikan Kembali</b> |
| <b>AKTIVA LANCAR</b>  |                        |                               | <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>  |                          |
| Kas dan setara kas  | 40.886.401.861         | 42.539.600.275                | Hutang bank - jatuh tempo dalam waktu satu tahun                          | 43.421.993.621           |
| Rekening bank dibatasi penggunaannya  | 191.162.971            | 115.225.147                   | Hutang Pajak  | 83.567.791.542           |
| Investasi neto sewa pembiayaan  | 290.335.736.270        | 371.653.168.377               | Hutang lain-lain  | 7.122.788.034            |
| Tagihan anjak piutang - Setelah dikurangi cadangan anjak piutang  | 436.699.013.411        | 393.674.414.259               | Hutang piutang  | 1.885.541.654            |
| Putang lain-lain  | 77.468.121.056         | 32.777.493.891                | Hutang pembiayaan Konsumen  | 173.344.152              |
| Biaya dibayar dimuka  | 32.638.197             | 30.110.869                    | Hutang pihak berelasi   | 17.195.030               |
| Aset Pajak Tangguhan  | 3.873.102.906          | 732.309.087                   | Hutang lain-lain  | 9.524.033.718            |
| <b>Jumlah Aktiva Lancar</b>   | <b>849.486.176.672</b> | <b>841.722.321.856</b>        | <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>                                     | <b>334.181.065.058</b>   |
|   |                        |                               |   | <b>321.896.094.041</b>   |
|   |                        |                               | <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>   |                          |
|   |                        |                               | Hutang bank - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun | 34.879.635.728           |
|   |                        |                               | Kerugian (keuntungan) selisih kurs - bersih                               | 45.705.043.316           |
|   |                        |                               | Penghapusan Putang  | 4.486.321.732            |
|   |                        |                               | Penghapusan Putang  | 3.272.118.100            |
|   |                        |                               | <b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>                                    | <b>39.365.957.460</b>    |
|   |                        |                               |   | <b>48.977.161.416</b>    |
| <b>AKTIVA TIDAK LANCAR</b>  |                        |                               | <b>EKUITAS</b>  |                          |
| Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.11.249.288.513 tahun 2020 dan tahun 2019 sebesar             | 3.317.757.890          | 3.609.821.528                 | Modal saham - nilai nominal   | 100.000.000.000          |
| Putang piutang  | 77.468.121.056         | 32.777.493.891                | Modal dasar 100.000 saham   | 1.118.608.656            |
| Biaya dibayar dimuka  | 32.638.197             | 30.110.869                    | Modal ditempatkan dan disetor penuh                                       | 1.453.720.750            |
| Aset Pajak Tangguhan  | 3.873.102.906          | 732.309.087                   | 100.000 saham tahun 2020 dan 2019   | 277.479.689.653          |
| <b>Jumlah Aktiva Tidak Lancar</b>   | <b>3.317.757.890</b>   | <b>3.609.821.528</b>          | Saldo laba  | 9.524.033.718            |
|   |                        |                               | <b>Jumlah Ekuitas</b>   | <b>277.479.689.653</b>   |
|   |                        |                               | <b>Jumlah Kewajiban DAN EKUITAS</b>                                       | <b>852.803.934.562</b>   |
| <b>JUMLAH AKTIVA</b>  | <b>852.803.934.562</b> | <b>845.332.143.384</b>        |   | <b>845.332.143.384</b>   |
| <b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b><br>Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019<br>(Dalam Rupiah Penuh)               |                        |                               |   |                          |
|   | <b>Modal Saham</b>     | <b>Tambahan Modal Disetor</b> | <b>Saldo Laba</b>   | <b>Jumlah</b>            |
| <b>Saldo 31 Desember 2018</b>   | 100.000.000.000        | 7.600.000.000                 | 301.554.109.341   | 409.154.109.341          |
| Dampak penerapan awal PSAK 24   | -                      | -                             | (2.450.199.806)   | (2.450.199.806)          |
| <b>Saldo 1 Januari 2019</b>   | 100.000.000.000        | 7.600.000.000                 | 299.103.909.535   | 406.703.909.535          |
| Penghasilan komprehensif lain   | -                      | -                             | (146.275.250)   | (146.275.250)            |
| Labas Bersih  | -                      | -                             | 67.901.257.642  | 67.901.257.642           |
| <b>Saldo 31 Desember 2019</b>   | 100.000.000.000        | 7.453.720.750                 | 367.005.167.177   | 474.458.887.927          |
| Penghasilan komprehensif lain   | -                      | -                             | (335.112.094)   | (335.112.094)            |
| Labas Bersih  | -                      | -                             | 5.133.196.211   | 5.133.196.211            |
| <b>Saldo 31 Desember 2020</b>   | 100.000.000.000        | 7.118.608.656                 | 372.138.363.388   | 479.256.972.044          |
| <b>LAPORAN RASIO KEUANGAN</b><br>Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019<br>(Dalam %)                             |                        |                               |   |                          |
|   | <b>2020</b>            | <b>2019</b>                   |   |                          |
| Financing To Asset Ratio (FAR)  | 34,04%                 | 43,97%                        |   |                          |
| Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total pendanaan yang diterima  | 81,61%                 | 103,72%                       |   |                          |
| Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total pendanaan yang diterima dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan | 100,00%                | 100,00%                       |   |                          |
| Rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPF)   | 49,22%                 | 30,14%                        |   |                          |
| Rasio permodalan  | 11,33%                 | 11,83%                        |   |                          |
| Gearing Ratio   | 16,74%                 | 27,25%                        |   |                          |
| Rasio ekuitas terhadap modal disetor  | 479,26%                | 474,46%                       |   |                          |
| Jakarta, 15 Maret 2021  |                        |                               |   |                          |
| Direksi   |                        |                               |   |                          |

| PT TRUBA SEGIHAN UTAMA   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| PANGGLIAN  |  |  |  |  |
| RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA   |  |  |  |  |
| Direksi perseroan terbatas PT Truba Segihan Utama, berkedudukan di Kota Samarinda (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada: |  |  |  |  |
| Hari/Tanggal   | : Selasa, 30 Maret 2021  |  |  |  |
| Waktu  | : 11.00 - 12.00 WIB  |  |  |  |
| Tempat   | : Rukan Permata Senayan Blok B 03-05, Jalan Tentara Pelajar RT 009 RW 007, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kabayoran Lama, Jakarta Selatan |  |  |  |
| Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/LB):   |  |  |  |  |
| a) Persetujuan atas tempat pelaksanaan Rapat di Jakarta;   |  |  |  |  |
| b) Persetujuan pembentukan/likuidasi Perseroan;  |  |  |  |  |
| c) Menyetujui untuk menunjuk sekaligus mengangkat Direksi selaku Likuidator Perseroan dalam rangka pelaksanaan beres-bers dan penyelesaian proses likuidasi Perseroan;   |  |  |  |  |
| d) Memberi kuasa dan wewenang kepada Likuidator untuk menyelesaikan aset-aset dan segala kewajiban Perseroan sehubungan dengan proses pembentukan/likuidasi;   |  |  |  |  |
| e) Serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan proses likuidasi Perseroan dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.  |  |  |  |  |
| Catatan:   |  |  |  |  |
| 1. Perseroan tidak memumumkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan karena iklan ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 anggaran dasar dan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.  |  |  |  |  |
| 2. Para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS/LB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan atau kuasanya.  |  |  |  |  |
| 3. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dan wajib membawa Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya.  |  |  |  |  |
| 4. Para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.   |  |  |  |  |
| Samarinda, 15 Maret 2021   |  |  |  |  |
| PT TRUBA SEGIHAN UTAMA   |  |  |  |  |
| Direksi Perseroan  |  |  |  |  |